

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN OLEH PT. SURYA HUTANI JAYA DI KECAMATAN MUARA KAMAN, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

Sri Utoro¹

¹Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Alamat Korespondensi : sriutoro.smd@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the implementation of forest and land fire control policies, as well as to determine the inhibiting and supporting factors at PT. Surya Hutani Jaya, Muara Kaman District, Kutai Kartanegara Regency. This study used a qualitative descriptive approach to obtain a description of the forest and land fire control program of PT. Surya Hutani Jaya in Muara Kaman sub-district, Kutai Kartanegara Regency, East Kalimantan Province. Data obtained by interviewing, observation, and documentation techniques, then analyzed using an interactive analysis model. Testing the validity of the data using source triangulation. The results showed that from the implementation of forest and land fire control by PT. Surya Hutani Jaya, shows that in general it goes well where from the various existing indicators, namely, indicators of size and standard objectives are understood by all implementing agencies, human resource support, funds, infrastructure, and time are well available, indicators of organizational characteristics have implementing agents strict, disciplined suit with high-risk work. Communication and coordination between implementing organizations is well established. Indicators of the attitude of the implementers provide strong support for this program for the sake of business continuity. In terms of the economic, social and political environment with a participatory concept with the community so that it gets good support by all stakeholders.*

Keyword: *Implementation of forest and land fire control policies, Surya Hutani Jaya.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung nya di PT. Surya hutani Jaya, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif untuk mendapatkan deskripsi tentang program pengendalian kebakaran hutan dan lahan PT. Surya Hutani Jaya di kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi

Kalimantan Timur. Data diperoleh dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan menggunakan model analisis interaktif. Pengujian terhadap keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari implementasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan oleh PT. Surya Hutani Jaya, menunjukkan bahwa secara umum berjalan dengan baik dimana dari berbagai indikator yang ada yakni, indikator ukuran dan standart tujuan dipahami semua agen pelaksana, dukungan Sumberdaya manusia, dana, sarana prasarana, dan waktu tersedia dengan baik, indikator karakteristik organisasi memiliki agen pelaksana yang ketat, disiplin sesuai dengan resiko tinggi pekerjaan. Komunikasi dan koordinasi antar organisasi pelaksana terjalin dengan baik. Indikator sikap para pelaksana memberikan dukungan yang kuat terhadap program ini demi keberlangsungan usaha. Dari sisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik dengan konsep partisipatif dengan masyarakat sehingga mendapatkan dukungan yang baik oleh semua pemangku kepentingan.

Kata kunci: Implementasi, kebijakan, kebakaran hutan dan lahan, pengendalian, Surya Hutani Jaya.

Pendahuluan

Fenomena bencana Karhutla di Indonesia yang terjadi berulang-ulang dengan penyebab utamanya adanya aktifitas manusia dalam mengelola lahan dimana kondisi cuaca sedang kemarau ekstrim sebagai dampak dari El nino. Diperparah lagi dengan kondisi lahan hutan yang terdegradasi. Akibat lajunya angka deforestasi yang terjadi secara masif, akibat dari alih fungsi Kawasan hutan, kegiatan illegal logging menjadikan kawasan hutan menjadi lahan terbuka dan belukar yang akan menjadi bahan bakar yang melimpah pada saat datangnya musim kemarau.

Kebakaran hutan besar yang terjadi tahun 1997, sampai dengan tahun 2019 kebakaran hutan dan lahan biasa disebut dengan Karhutla terjadi hampir setiap tahun. Dampak El Nino tahun 2015 yang melanda sebagian besar wilayah Indonesia di duga telah terbakar hutan dan lahan hampir di seluruh wilayah Indonesia menurut catatan BNPB ada lebih dari 2,6 juta hektar hutan dan lahan yang terbakar. Kebakaran tersebut masih berlanjut samapai dengan awal tahun 2016 mencapai luar kebakran hingga 14 ribu hektar lebih.

Dampak dari terjadinya Karhutla meliputi dampak ekonomi, Sosial dan lingkungan hidup terutama polusi udara akibat asap yang dihasilkan mencemari kualitas udara yang berdampak secara nasional bahkan secara Regional terutama Kawasan Asia Tenggara, yang dapat berpengaruh ke dunia Internasional.

Perencanaan Nasional Pencegahan karhutlabun oleh Bappenas dalam rentang waktu 15 tahun terakhir di mulai dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2015 seperti dalam kutipannya : “puncak titik hot spot melebihi angka 15.000 terjadi pada tahun 2002, 2004, 2006, 2009, 2014 dan 2015. Kebakaran tersebut terjadi baik di dalam

maupun di luar konsesi. Rata-rata titik panas selama periode tersebut, 45 % terdapat di wilayah konsesi dengan rincian 4 % di areal ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam (IUPHHK-HA), 23 % di areal ijin usaha pemanfaatan hasil hutan dalam hutan tanaman (IUPHHK-HT), 16 % di areal Kebun kelapa Sawit (KKS) dan 2 % di areal tumpang tindih ketiganya, dan 55 % terjadi diluar konsesi yakni 34 % di kawasan hutan, 21 % di areal penggunaan lain (APL). Adapun luas total kebakaran dalam periode tahun 2000 – 2015 yang mencapai luas 101.791.661 Ha terjadi 34 % di dalam konsesi dan 66 % di luar konsesi”.

Kejadian karhutla pada tahun 2015 di Propinsi Kaltim seluas 69.352,96 Ha, tahun 2016 seluas 43.136,78 Ha, Tahun 2017 seluas 676,38 Ha dan Tahun 2018 seluas 26.605,57 Ha.

Upaya pencegahan karhutla yang dilakukan di antaranya melalui kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar/PLTB (zero burning policy). Ditindak lanjuti dengan berbagi kebijakan yang ditetapkan baik dari pemerintah pusat hingga ke daerah berupa peraturan pemerintah, undang-undang dan perda. Dengan kejadian karhutla yang besar pada tahun 2015 akibat dampak El nino melalui KLHK (Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup) mengeluarkan kebijakan berupa Permen LHK Nomor P.32/Menlhk/Setjen/kum.1/3/2016, tanggal 18 April 2016, tentang Pengendalian Kebakaran Hutan. Dengan diterbitkan kebijakan ini bertujuan agar ada pedoman yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan, penanggulangan dan penanganan karhutla mulai dari perencanaan sampai dengan pasca karhutla untuk semua pemangku kepentingan (*stake holder*) agar karhutla bisa terdeteksi sejak dini dan tidak meluas jika terjadi karhutla.

Dengan diberlakukan kebijakan pemerintah melalui menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini di harapkan semua stake holder menjalankan dengan kesungguhan mulai dari Pemerintah tingkat pusat sampai dengan Unit pelaksana pengelola dengan harapan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dapat di wujudkan dan meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau Zero Burning . Upaya sosialisasi kebijakan pemerintah ini telah di sampaikan keseluruhan stake holder yang berkompeten termasuk di sektor bidang usaha kehutanan melalui Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup di Jakarta, Dinas kehutanan propinsi atau Instansi perpanjangan dari kewenangan KLHK yang di daerah daerah. Setiap unit Pelaksana pengelolaan wajib melaksanakan pengendalian Karhutla sesuai dengan kebijakan pemerintah ini, karena unit Pelaksana pengelolaan keberadaannya di daerah operasi yang selama ini menjadi daerah paling rawan terjadinya kebakaran, yang paling berpotensi untuk dapat melakukan pemadaman awal agar tidak meluas.

Unit Pelaksana Pengelolaan salah satunya adalah pemegang IUPHHK-HT (Hutan Tanaman) diwajibkan untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah ini seperti yang termaktub di dalam Permen LHK nomor P.32 tahun 2016, PT. Surya Hutani jaya, merupakan salah satu pemegang ijin usaha dibidang kehutanan tidak terlepas dari kewajiban untuk mematuhi dan berperan aktif dalam upaya Dalkarhutla di wilayah kerja dan sekitarnya.

Kerangka Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik mempunyai banyak definisi dimana, Ramlam surbakti dalam ekowati (2008:1) meyebutkan “Kebijakan yang dimaksud di sini adalah Kebijakan Publik atau kebijakan umum. Kebijakan publik adalah kebijakan yang meyangkut masyarakat umum. Kebijakan publik ini adalah bagian dari keputusan politik. Keputusan politik itu sendiri adalah keputusan yang mengingat pilihan terbaik dari berbagai bentuk alternative mengenai urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah”.

Menurut Nakamura dan Smalwood dalam ekowati (2008:5) “Kebijakan public berarti serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana untuk mencapai tujuan tersebut”. Seiring dengan pendapat tersebut menurut R. S. Parker dikutip dalam ekowati (2008:5) “kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian prinsip atau tindakan yang dilakukan oleh suatu pemerintah pada periode tertentu ketika terjadi suatu subjek atau krisis”. Senada dengan pengertian diatas Andreson juga berpendapat bahwa “Kebijakan Publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga atau badan pemerintah, implikasi dari pengertian ini adalah: a). Bahwa kebijakan itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan suatu tindakan yang berorientasi tujuan. b).Bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola tindakan pejabat pemerintah. c). Bahwa kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah. d). Bahwa Kebijakan itu berdasarkan pada peraturan atau perundang-undangan yang bersifat memaksa”.

Konsep lain dari Thomas R. Dye dikutip Samudra (2011:2) mengatakan “*Public policy is whatever government chose to do or not. to do* (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan)”. Menurut pendapat tersebut menunjukkan dengan gambalng bahwa jika pemerintah melakukan tindakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan termasuk kebijakan public demikian sebaliknya jika pemerintah tidak melakukan suatu tindakan juga tergolong kebijakan public, karena Tindakan pembiaran akan berdampak yang realtif sama besarnya jika pemerintah melaksanakan tindakan. Dari definisi ini Dye mendefinisikan “kebijakan public sebagai pilihan pengambilan keputusan pemerintah”.

Mengacu beberapa definisi yang telah dipaparkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan public merupakan serentetan keputusan yang diambil, dilaksanakan dan dirumuskan untuk ditetapkan oleh actor politik atau Lembaga pemerintah (instansi publik) dalam rangka mengatasi atau memberikan penyelesaian atas masalah yang muncul di publik dengan tujuan menyejahterakan masyarakat atau tujuan lain yang telah ditetapkan.

Implementasi Kebijakan Publik

Dalam kajian studi implementasi menitikberatkan pada upaya dilaksanakannya kebijakan yang telah dirumuskan. Karena pada dasarnya kebijakan yang ditetapkan harus diimplementasikan agar berdampak tercapainya tujuan yang diinginkan.

Menurut Presman dan Waldavsky dalam Hill. (2008:3) mendefinisikan “implementasi kebijakan sebagai upaya melaksanakan, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan dan melengkapi”. Jadi secara etimologis implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktifitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Dalam Wahab.

(2008:64), pengertian implementasi di kamus Webster diartikan sebagai “mengimplementasikan dengan menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu kebijakan untuk mencapai dampak/akibat terhadap sesuatu tertentu”.

Menurut Jones dalam Widodo. (2009:86) mengatakan implementasi diartikan sebagai *getting the job done* dan *doing it*, lebih jauh mengatakan, implementasi adalah kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan.

Dari uraian di atas dapat digambarkan bahwa Implementasi merupakan suatu aktifitas cara pelaksanaan dari suatu kebijakan penyelesaian pekerjaan dengan menggunakan sarana dan melaksanakan suatu kebijakan dengan cara saling mempengaruhi antara penyusun tujuan dengan sarana-sarana tindakan agar tercapainya target yang telah digariskan.

Dalam kutipan Wahab (2012:135), Van Matter dan Van Horn mengatakan bahwa “Implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individual/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.

Proses implementasi merupakan gambaran kinerja suatu implementasi kebijakan yang telah dilakukan secara terencana dengan mempertimbangkan berbagai indikator atau variabel. Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn, “enam indikator atau variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu : 1). Ukuran dan tujuan kebijakan. 2). Sumber daya. 3). Karakteristik agen pelaksana. 4). Sikap/ kecenderungan (*disposition*) para pelaksana. 5). Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana. 6). Lingkungan ekonomi, sosial dan politik”.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif (*qualitative research*), untuk mengungkapkan peristiwa-pristiwa yang terdapat dibalik fenomena yang ada. Maksud peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk menggambarkan atau diskripsi dan mendapatkan pemahaman yang mendalam serta menyeluruh tentang implementasi kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan serta faktor pendukung dan penghambatnya studi kasus di PT. Surya Hutani Jaya. Penelitian ini dilaksanakan di PT. Surya Hutani Jaya, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Sampel yang digunakan dalam Metode penelitian kualitatif ini menggunakan sample kecil, tidak representatif dan berkembang selama proses pengambilan data selama penelitian dilakukan, dimana didahului dengan sampel *purposive* (ditentukan selaras dengan tujuan studi). Adapun pada awal penelitian ini sampel (*subyek/informan*) yang ditentukan adalah Fire Operation Manager, Fire Marshall, dan Team RPK, Forest Protection Manager, CSR Section Head, Masyarakat Peduli Api, Kepala Desa sekitar Konsesi, Ketua Kelompok Tani.

Metode wawancara, obsevasi dan dokumentasi peneliti gunakan dalam proses pengumpulan data dari Informan (Sugiyono, 2015), model analisis interaktif menjadi pilihan dalam menganalisis data yang diperoleh selama penelitian.

Selanjutnya keabsahan data penelitian di uji dengan dengan model triangulasi sumber (Sugiono,2015:270).

Hasil dan Pembahasan

Menurut Donald Van meter dan Van Horn dalam Winarno (2007:146) membatasi “implementasi kebijakan sebagai tindakan tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya”

Implementasi kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan oleh PT. Surya Hutani Jaya di Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur.

Dalam upaya mengamankan areal PT. Surya Hutani Jaya dari acaman kebakaran hutan dan lahan, dengan menerapkan strategi empat pilar utama yaitu pencegahan, persiapan, deteksi dini dan reaksi cepat.

Penulis menggunakan 6 indikator atau variabel untuk menilai implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan PT. Surya Hutani Jaya, yaitu indikator Ukuran dan Tujuan kebijakan, indicator Sumberdaya, indicator Karakteristik para Pelaksana, indicator sikap kecenderungan para pelaksana, indicator komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana serta indicator lingkungan ekonomi, sosial dan politik, serta melihat faktor penghambat dan Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan tersebut.

Standart dan Tujuan Kebijakan

Ukuran dasar kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan mengacu landasan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dalam pembahasan ini lebih kepada kebijakan pemerintah melalui Permen LHK nomor 32 tahun 2016 dan di tindak lanjuti dengan komitmen manajemen PT. Surya Hutani Jaya sebagai salah satu mitra pemasok bahan baku APP Sinar Mas wajib menjalankan kebijakan *Forest Conservation Policy*.

Melalui strategi empat pilar utama upaya mengamankan areal kerja dari ancaman kebakaran dapat terwujud dengan melakukan pemantauan deteksi dini dalam areal kerja sampai dengan jarak terluar 5 km dari batas konsesi menjadi target pencegahan, deteksi dini dan pemadaman. Hal ini di maksudkan standar dan ukuran kejadian kebakaran sampai dengan jarak 5 km dari batas konsesi wajib hukumnya untuk dilakukan pemadaman agar tidak sempat menjalar masuk ke areal kerja secara meluas. Pemahaman mengenai deteksi dini, pada saat terdeteksi asap dengan kesigapan team reaksi cepat maksimal terbakar seluas 0,1 ha team regu pemadam harus sudah mencapai titik asap dengan segala peralatannya dan dalam waktu satu jam api harus sudah terkendali dan dipadamkan.

Hal ini di tunjukan dengan penurunan yang cukup signifikan luas arel terbakar pada tahun 2015 seluas 1131,3 ha menjadi 139 ha pada tahun 2019, dan sampai dengan bulan Juli 2020 belum ada luas kebakaran yang terjadi dengan upaya deteksi dini yang

dilaksanakan oleh team dalkahutla PT. Surya Hutani Jaya. (Fire Report Operation System/FROS, PT. Surya Hutani Jaya, 2020).

Sumberdaya

Komponen sumberdaya dalam mendukung keberhasilan kebijakan ini meliputi (manusia, finansial, sarana prasarana dan waktu) serta sumberdaya lain yang turut mendukung lancarnya implementasi kebijakan. Sumberdaya manusia yang cukup secara kuantitas dan mempunyai kualitas kompetensi sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan, berperan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan,

Ketersediaan sumber daya dalam implementasi kebijakan dalkarhutla oleh PT. Surya Hutani Jaya tersedia dengan cukup sesuai kebutuhan dilapangan, demikian juga kualitas sumberdaya manusia memenuhi kriteria yang ditentukan, dengan dibekali pelatihan dan training dibidang dalkarhutla.

Karakteristik Organisasi Pelaksana.

Kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksana kebijakan baik yang berbentuk organisasi formal maupun organisasi informal. Dimana organisasi pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan dipengaruhi oleh kompetensi dan ukuran staf suatu organisasi, tingkat pengawasan hirarki dan proses dalam organisasi, tingkat komunikasi horizontal dan vertikal.

Mengingat pekerjaan pemadaman kebakaran mempunyai tingkat resiko yang tinggi, tingkat keberhasilan program dalkarhutla ini memerlukan kompetensi, aturan dan disiplin yang ketat. Sehingga dalam menjalankan tugasnya harus berpegang pada *Standart Operating Procedure* yang telah di buat dan ditetapkan di tiap bagian kegiatan dan setiap agen pelaksana wajib memahami *job discriptionnya* masing-masing.

Komunikasi Antar Organisasi Pelaksana

“Prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (*accuracy and consistency*)”

Dalam implementasi kebijakan program dalakarhutla di PT. Surya Hutani Jaya pemahaman tujuan dari program dalkarhutla dengan Zero Fire, di komunikasikan secara berkelanjutan dan didoktrinkan sejak awal perekrutan karyawan sebagai regu pemadam kebakaran yang tugas pokok dan fungsinya menjaga areal kerja dan sekitarnya dari bahaya kebakaran. Setiap unit manajemen atau distrik memiliki *key performance indicator* sebagai tolok ukur penilaian pelaksanaan program dalkarhutla yang akan dievaluasi setiap bulannya. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan dalkarhutla, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

Disposisi atau Sikap Para Pelaksana

Kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan merupakan kebijakan top down termasuk yang dijalankan PT. Surya Hutani Jaya, kebijakan yang wajib dilakukan oleh pelaksana lapangan. Para pelaksana lapangan mulai staff sampai pelaksana lapangan direkrut, diseleksi dan berkomitmen dengan kesadaran tinggi dan disiplin siap melaksanakan kebijakan program dalkarhutla. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya para agen pelaksana telah dibekali dengan kemampuan dan kompetensi tentang dalkarhutla, serta dibentuk jiwa korsa dalam team regu pemadam kebakaran yang kuat. Hal ini membuat para agen pelaksana program dalkarhutla PT Surya Hutani Jaya, menunjukkan sikap penerimaan dengan kemauan dan kemampuan yang memadai dengan program kebijakan dan siap menerima sanksi yang tegas jikalau ditemukan keteledoran mereka dalam menjalankan program dalkarhutla yang berakibat hilangnya asset perusahaan berupa tanaman terbakar dengan tidak terkendali ataupun perusahaan mendapatkan sanksi dari pemerintah akibat kebakaran tak terkendali di areal kerjanya.

Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Kondisi lingkungan juga perlu mendapatkan perhatian guna melihat keberhasilan penerapan kebijakan dalkarhutla, dimana indikator lingkungan (dalam dan Luar) turut mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik. Karena dengan kondisi Poleksos (politik, ekonomi dan sosial) di Lingkungan sekitar kebijakan di jalankan, apabila tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Kondusifitas lingkungan sangat diperlukan untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan kebijakan dalkarhutla.

Lingkungan sosial yang tidak kalah penting yaitu pelibatan masyarakat sekitar dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan perekrutan masyarakat sekitar sebagai anggota Masyarakat Peduli Api (MPA), perekrutan anggota pos siaga pencegahan kebakaran (Sigahkar) dan perekrutan sebagai anggota fire fighter dengan dididik dan dilatih dengan proses seleksi yang ketat. Sosialisasi tentang bahaya kebakaran ke masyarakat dilakukan berkolaborasi dengan dinas kehutanan yang diselenggarakan di balai desa dengan mengundang perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua kelompok tani. Melalui program DMPA memberikan usaha produktif peternakan lebah, kambing dan sapi dengan sistem bergulir, usaha pencetakan sawah, tumpang sari tanaman padi kering, budidaya ikan, hortikultura, kerajinan tangan, pembuatan kue. Usaha produktif ini dimaksudkan memberikan penguatan ekonomi masyarakat secara mandiri dan tidak lagi menggantungkan mata pencaharian dari kawasan hutan. Semua usaha produksi yang dijalankan di setiap desa ditentukan melalui *forum group discussion* (FGD) antara seluruh tokoh masyarakat yang difasilitasi desa dan CSR perusahaan. Sehingga usaha produksi tetap mempertimbangkan faktor kultural dan potensial yang ada di masing-masing desa.

Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung

Dalam mengimplementasikan program pengendalian kebakaran hutan dan lahan dari hasil wawancara informan dan observasi di lapangan yang menjadi faktor pendukung dalam menjalankan program dalkarhula dari internal dengan adanya

dukungan Top manajemen yang sangat baik, dukungan para pelaksana, karyawan memberikan komitmen dukungan dalam implementasi kebijakan dalkarhutla. Dukungan dari eksternal juga cukup baik yaitu adanya dukungan dari para pemangku kepentingan desa sekitar, Muspika bahkan kolaborasi BPBD kabupaten dan Dinas Kehutanan Propinsi.

Faktor penghambat dari internal muncul dimana menjelang masa darurat kebakaran kepala distrik selaku distrik *commander* sekaligus sebagai kepala operasional masih fokus operasional, hal ini di maksudkan sebagai pencegahan dini distrik komander dapat lebih tanggap dan cepat fokus ke masa darurat, Mulai mengeringnya Embung2 air, sumber air dilapangan dan akses jalan di area konservasi tidak terpelihara dengan baik. Faktor penghambat dari eksternal banyak disebabkan kelalaian masyarakat berburu, pencari ikan dan kayu dikawasan konservasi akibat merokok, atau perapian yang tidak sempurna dipadamkan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan oleh PT. Surya Hutani Jaya, di kecamatan Muara Kaman kabupaten Kutai Kartanegara sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat parameter dimana angka luas kebakaran terjadi penurunan cukup signifikan, pada tahun 2015 dengan luas kebakaran 1131,3 ha turun menjadi 139,3 ha pada tahun 2019. hal ini didukung dengan fakta penilaian indikator variabel sebagai berikut : 1). Ukuran dan tujuan kebijakan sangat dipahami dan di mengerti oleh semua pelaksana lapangan, dan terkomunikasikan secara berkelanjutan. 2). Sumber daya manusia dipenuhi kuantitas dengan kompetensi dan kecakapan khusus, dukungan finansial yang sangat baik, penyediaan sarana prasana pencegahan, penanggulangan dan prasaran lain sangat memadai, dukungan manajemen terhadap sumberdaya waktu juga baik. 3). Karakteristik Organisasi pelaksana juga ditunjukkan dengan adanya struktur organisasi hingga ke unit manajemen dengan pembagian tugas yang jelas sesuai *job discription* nya, tersedianya standart prosedur operasional. 4). Komunikasi antar organisasi pelaksana dengan adanya struktur organisasi yang jelas, koordinasi & komunikasi berjalan dengan baik. 5). Sikap (disposisi para pelaksana, menunjukkan tidak adanya penolakan dari para pelaksana bahkan mendukung dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dengan kedisiplinan yang tinggi. 6). Dari sisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik juga menunjukkan kecenderungan yang baik, dengan usaha produktif yang dijalankan, program yang dijalankan partisipatif terhadap semua pemangku kepentingan di masyarakat.

Rekomendasi

1. Beberapa faktor yang menyulitkan dalam pelaksanaan dilapangan perlu dilakukan penyelesaian lebih dini yaitu perbaikan jalan di area konservasi dan tanaman tua menjelang masa darurat kebakaran, yang tentunya akan berkorelasi dengan

- tambahan biaya pencegahan kebakaran jika dibandingkan dengan tingkat kerugian yang ditimbulkan terjadi kebakaran di area tersebut.
2. Perlu di analisis kemungkinan pembuatan embung air yang lebih besar dan dalam dengan sumber air yang cukup agar ketersediaan air dapat bertahan meski kemarau panjang.
 3. Untuk mengantisipasi adanya pelaku spekulasi tanah dalam pembukaan ladang, perlu kiranya dilakukan penelitian lanjutan tentang kearifan lokal masyarakat sekitar hutan dalam berpartisipasi dalkarhutla terutama pada kegiatan pembukaan perladangan yang secara turun temurun dari nenek moyangnya dilakukan dengan membakar.
 4. Perlu kiranya di analisis kemungkinan melakukan pencegahan Dalkarhutla berkolaborasi dengan perusahaan lain yang berada disekitar areal kerja, masyarakat sekitar dan muspika setempat. Hal ini juga dimaksudkan mempermudah sistem koordinasi dengan pihak lain yang mempunyai kewajiban yang sama dalam melaksanakan kebijakan dalkarhutla ini.
 5. Perlu adanya penelitian lanjutan tentang Implementasi Kebijakan Dalkarhutla, untuk mengkaji system koordinasi antar institusi mulai dari tingkat propinsi, kabupaten, kecamatan dan atau desa yang melibatkan seluruh komponen dalkarhutla agar dapat berjalan efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung
- Ekowati. 2008. *Perencanaan, Implementasi & Evaluasi Kebijakan atau Program*. Surakarta: Pustaka Cakra.
- Forest Fire Prevention and Management Project. 2007. *Sistem Deteksi dan Peringatan Dini*.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016. *Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan*, Jakarta.
- LAPAN. 2004. *Sebaran Titik Panas Menurut Penggunaan Lahan di Pulau Sumatera*. SIMBA-LAPAN.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahrani. 2015. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Makindo Grafika
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wibawa, Samudra. 1994. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Winarno, B. 2012. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta : PT Buku Seru.

Sumber Internet:

- <http://www.bmkg.go.id/cuaca/kebakaran-hutan.bmkg>
- <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/24/17291701>
- <https://www.antaraneews.com/berita/976772/app-sinar-mas-alokasikan-rp13-triliun-atasi-karhutla>
- <http://www.lapanrs.com>.